

## STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI TENGAH PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus di Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)

**BRIGITA P. RAHABAV**

**ARIE J. RORONG**

**ALDEN LALOMA**

**brahabav@gmail.com**

### Abstrak

Pemberdayaan masyarakat terkait dengan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi dan kemampuan yang mereka miliki untuk secara mandiri menemukan solusi dari permasalahan sehari-hari yang mereka temui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah desa di tengah pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi pemberian tanggungjawab dan wewenang sudah berjalan dalam memberdayakan masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan serta adanya program pemberdayaan; dari segi menciptakan kondisi saling percaya antara pemerintah dan masyarakat sudah terbangun dengan baik; dan dari segi *employee involvement* sudah dilakukan dengan baik dengan adanya pelibatan *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan.

**Kata kunci:** Strategi Pemberdayaan, Masyarakat, Pandemi COVID-19

### Abstract

*Community empowerment is related to efforts to make the community independent through the realization of their potential and abilities to independently find solutions to the everyday problems they encounter. This study aims to determine the village community empowerment strategy by the village government in the midst of the COVID-19 pandemic. This study used descriptive qualitative method. The results of the study indicate that in terms of giving responsibility and authority, it has been running in empowering the community in the form of providing assistance and empowerment programs; in terms of creating conditions of mutual trust between the government and the community, it has been well developed; and in terms of employee involvement, it has been done well with the involvement of stakeholders in the decision-making process.*

**Keywords:** Empowerment Strategy, Community, Pandemic COVID-19

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan adalah keadaan-keadaan yang terjadi atau hal-hal yang dilakukan di lingkungan masyarakat dalam upaya membangun pembangunan yang bertumpu pada masyarakat itu sendiri (Masikome, Lengkong dan Londa, 2018). Pemberdayaan masyarakat terkait dengan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi dan kemampuan yang mereka miliki untuk secara mandiri menemukan solusi dari permasalahan sehari-hari yang mereka temui, seperti pada masalah pembangunan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, serta masalah kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat desa ini dilandaskan pada Permendesa PDPTT 17 Tahun 2019 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah peraturan menteri untuk melaksanakan ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Proses pemberdayaan masyarakat bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan serta mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Masyarakat miskin merupakan sasaran utama dari adanya pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan agar masyarakat ini mampu untuk mandiri bahkan dalam proses penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari.

Pada bulan Maret Tahun 2020, Indonesia telah terinfeksi virus COVID-19 yang merupakan bencana non alam dan tidak terkecuali Sulawesi Utara yang telah menginfeksi pada berbagai segi kehidupan mulai dari segi kesehatan hingga mempengaruhi kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. COVID-19 telah menyebabkan tekanan pada tingkat

kesejahteraan masyarakat desa, pelaku usaha dan UKM, dan pekerja dengan gaji rendah pada usaha skala besar dan menengah ke tingkat yang lebih rendah, bahkan ke tingkat di bawah garis kemiskinan. Banyak keluarga hampir miskin yang jatuh menjadi miskin, dan sangat miskin akibat dampak COVID-19 terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Komunitas pekerja informal yang menggantungkan hidup pada pendapatan harian seperti sopir angkot, tukang ojek, tukang parkir, penyandang disabilitas, karyawan yang kena PHK, pedagang kantin sekolah, pedagang kaki lima, dan kuli panggul. Menyikapi fenomena ini maka perlu adanya inovasi desa dalam upaya pembangunan serta pemulihan keadaan ekonomi melalui strategi pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam penanganan sebuah bencana terdapat kekurangan yang berasal dari masyarakat itu sendiri menurut Masikome, Lengkong dan Londa (2018) yaitu, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengantisipasi bencana atau kurangnya sumberdaya manusia, ketergantungan pada suatu unsur terkait atau pemerintah, penguasaan teknologi yang rendah, kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Strategi dapat dipandang sebagai cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Arti pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri.

Masyarakat Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat, merupakan salah satu dari sekian banyak desa yang telah terdampak COVID-19. Dalam upaya menghadapi gejala yang diakibatkan oleh adanya Pandemi COVID-19 masyarakat desa ini melakukan berbagai kegiatan yang menuntut kolaborasi

antara pemerintah desa, organisasi desa serta dukungan dan partisipasi penuh dari masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan bukan hanya sekedar untuk mengurangi dampak kesehatan atau dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 akan tetapi juga untuk mencegah serta mengantisipasi masalah-masalah lain yang dapat saja terjadi diakibatkan adanya penyebaran pandemi ini.

Dalam menyikapi segala kemungkinan yang dapat terjadi akibat pandemi ini Desa Kolongan Tetempangan membentuk tim relawan sesuai dengan anjuran pemerintah pusat yang kemudian disebut desa siaga COVID-19. Relawan ini kemudian bertugas untuk mencegah dan melakukan penanganan COVID-19 di tingkat desa serta melakukan koordinasi intensif dengan dinas kesehatan, dinas pemberdayaan masyarakat desa dan badan penanggulangan bencana daerah. Tim ini diketuai oleh Kepala Desa serta dibantu oleh Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dan Aparat Desa, sedangkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dan pendamping desa berperan sebagai mitra untuk pelaksanaan ini. Namun, peran dari keseluruhan tim yang telah dibentuk ini tidak akan terealisasi dengan baik apabila tidak ada penerahan atau penguatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi secara aktif serta membantu melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang telah ditetapkan agar supaya masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat dapat ditemukan solusi secara bersama serta masyarakat mandiri dalam upaya menyelesaikan berbagai problematika yang menghampiri. Kesemuanya ini dapat dilakukan melalui adanya pemberdayaan masyarakat desa.

Di tingkat desa dampak yang dihadirkan oleh COVID-19 jarang terjadi dari segi kesehatan, namun yang paling sering terjadi ialah dampak secara sosial ekonomi yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, penurunan produktivitas, pendapatan, serta menutup berbagai peluang

usaha dari desa termasuk pada kehilangan pekerjaan.

Tantangan lain yang harus dihadapi oleh desa selain pada penyebaran pandemi adalah berbagai permasalahan lainnya terkait dengan ketahanan pangan serta mata pencaharian yang semakin berkurang. Hal ini memerlukan pendekatan gotong-royong untuk saling membantu sesama masyarakat desa, penting hal ini untuk diperhatikan karena mencakup persoalan kemanusiaan. Hal-hal ini menuntut pemberdayaan masyarakat yang masif untuk mengerahkan dan memberikan kekuatan kepada masyarakat agar supaya dapat paham dan mandiri terkait dengan persoalan yang sedang dihadapi. Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa, masih kurangnya pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah dimana masyarakat yang sudah kehilangan dayanya dalam menghadapi gejala pandemi ini harus berupaya secara mandiri dalam pencegahan dan pemulihan pandemi di tingkat desa. Hal ini menyebabkan sulitnya pemulihan ekonomi meskipun telah mendapat berbagai stimulus bantuan dari pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi di desa.

Berbagai dinamika yang terjadi atas segenap dampak akibat pandemi ini, masyarakat selain sebagai faktor yang mendukung tercapainya tujuan dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 serta pemulihan keadaan sosial ekonomi masyarakat, seringkali sebaliknya menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Pengoptimalan segenap sumber daya serta segala potensi yang dimiliki merupakan hal yang sangat penting. Ketidaktahuan masyarakat ataupun ketidakmampuannya, menjadi salah satu titik lemah dalam pemberdayaan masyarakat. Seperti fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang dapat menerima dan paham akan bahaya COVID-19 dengan segala upaya dan daya serta dorongan dari pemerintah melakukan berbagai kegiatan seperti mengadakan tempat cuci tangan dan melakukan mitigasi-mitigasi secara mandiri.

Namun, sebagian masyarakat lain justru tidak melakukan apapun. Hal ini dikarenakan ada keterbatasan pengetahuan, serta daya maupun dana dari masyarakat.

Hal lain terkait dengan polemik pemberdayaan masyarakat desa di tengah pandemi COVID-19, kurangnya daya tangkap masyarakat yang berkaitan dengan pemahaman akan diberi bantuan oleh pemerintah secara terus-menerus. Dapat dibenarkan bahwa berbagai stimulus bantuan oleh pemerintah telah diluncurkan, namun dari pihak masyarakat sendiri justru terjebak dengan semerautnya keadaan yang membawa masyarakat pada kegagalan pemahaman, yang menyebabkan krisis sosial.

Pemberdayaan masyarakat yang masih kurang di Desa Kolongan Tetempangan berkaitan erat dengan masih kurangnya kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari dan menemukan informasi yang valid dan benar, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui usaha-usaha yang berkembang baik dalam industri rumahan maupun pertanian, hal ini terkait dengan perilaku masyarakat yang mengakibatkan terhambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Pemerintah Desa Kolongan Tetempangan dalam hal ini belum sepenuhnya memberikan tanggungjawab beserta wewenang, pemerintah desa juga kurang menciptakan dan membangun sikap saling percaya antara pemerintah dan masyarakat setempat, bantuan-bantuan dari pemerintah dari pemerintah untuk masyarakat juga belum tepat sasaran, dan kurangnya pelibatan *stakeholders* dalam pengambilan keputusan.

Kajian-kajian terkait pemberdayaan masyarakat desa telah dilakukan sebelumnya oleh Tulung, Laloma dan Kolondam (2020) dalam kajian pemberdayaan masyarakat petani gula aren di Desa Tambelang Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara. Kajian lain dilakukan oleh Markus, Sondakh, dan Laloma (2017) dalam kajian

pemberdayaan pemerintah desa dalam rangka pelayanan masyarakat di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe. Kajian selanjutnya dilakukan oleh Masikome, Lengkong dan Londa (2018) dalam kajian pemberdayaan masyarakat korban bencana banjir di Kota Manado.

Kajian yang telah dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah desa ditengah pandemi COVID-19. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat secara teoritis pada pengembangan keilmuan Administrasi Publik dan secara Praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat dalam pemberdayaan masyarakat desa.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Awang, 2010). Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*Empowerment*), berasal dari kata "*Power*" (Kekuasaan atau Keberdayaan) karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.

Pengertian lain tentang pemberdayaan masyarakat desa dikemukakan oleh Bakri (2017) bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat terlepas dari perangkap kemiskinan maupun keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan dapat dikatakan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik.

Pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*) adalah perwujudan *capacity building* masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pengembangan kelembagaan pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan seiring dengan pembangunan sistem sosial ekonomi rakyat, prasarana dan sarana, serta pembangunan Tiga-P: Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, Penyuluhan dapat merespon dan memantau ubahan-ubahan yang terjadi di masyarakat, dan pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi asset sumberdaya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat. Vitalya (2000) dalam Bakri (2017).

### **B. Konsep Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Konsep pemberdayaan bukan hanya menyangkut persoalan ekonomi tetapi merupakan konsep yang menyangkut semua aspek kehidupan. Ke semua aspek kehidupan itu haruslah diberdayakan secara bersamaan dan intergrative dan pemberdayaan ekonomi harus pula disertai dengan pemberdayaan sosial budaya dan politik, begitu pula sebaliknya (Bakri, 2017). Dari definisi tersebut dapat diambil beberapa hal penting tentang pengertian pemberdayaan, yakni meliputi:

1. Pemberian tanggungjawab dan wewenang
2. Menciptakan Kondisi Saling Percaya antar pemerintah dan masyarakat
3. Adanya *employe involvment* yaitu melibatkan stakeholders dalam pengambilan keputusan

Hal ini diyakini sebagai strategi yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi serta ketahanan nasional.

### **METODE**

Penelitian yang telah dilakukan ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang strategi pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Desa di Tengah Pandemi COVID-

19. Penelitian ini berfokus pada strategi pemberdayaan masyarakat desa dengan berdasar pada Teori yang dikemukakan oleh Bakri (2017) yang memuat 3 Dimensi yakni:

- a) Pemberian Tanggungjawab dan Wewenang
- b) Menciptakan kondisi saling percaya antar pemerintah dan masyarakat
- c) Adanya *employe involvment* yaitu melibatkan stakeholders dalam pengambilan keputusan.

Metode pengumpulan data yaitu meliputi wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan, observasi langsung ke lokasi penelitian, serta melakukan studi dokumentasi dan studi pustaka terkait dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan sejak penelitian dilakukan yang mencakup reduksi data untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan serta membuang yang tidak perlu dan diorganisasikan sedemikian rupa, kemudian disajikan dalam bentuk narasi, dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan ketika semua data telah terhubung satu dengan yang lain.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pemberian Tanggungjawab dan Wewenang**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, terlihat bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan yang sangat luas dalam mengatur dan menjaga wilayahnya (Wonok, 2020). Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan-informan terkait bahwa bentuk tanggungjawab dari pemerintah yang dilakukan selama pandemi COVID-19 berlangsung ialah memberikan bantuan kepada masyarakat dengan harapan bahwa pemberian bantuan tersebut dapat membangkitkan kembali roda perputaran ekonomi masyarakat. Disamping memberikan bantuan pemerintah desa juga mengadakan program-program pemberdayaan masyarakat desa seperti: pelatihan tata boga, pelatihan tata rias, pelatihan pangkas rambut,

dan pemberian bibit ikan mujair untuk masyarakat yang memiliki lahan. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan juga kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, akan tetapi sesuai dengan penelitian yang dilakukan ditemui masih ada bantuan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran sehingga masih ada beberapa yang belum dapat memenuhi kebutuhannya, serta masih kurangnya pengawasan dan koordinasi dari pemerintah desa sehingga ada beberapa masyarakat yang mengikuti pelatihan yang bingung setelah pelatihan akan mereka apakan ilmu yang mereka dapat karena setelah pelatihan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah seperti pemberian alat bantu usaha ataupun modal untuk usaha, contohnya juga untuk penerima bantuan bibit ikan mujair, koordinasi yang dilakukan hanya disaat pemberian bibit ikan mujair, setelah itu tidak ada koordinasi serta pengawasan dari Pemerintah Desa. Disamping itu juga tidak ada pelatihan atau sosialisasi bagi penerima bantuan bibit ikan mujair. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah tersebut merupakan bentuk pemberian tanggungjawab dan wewenang oleh pemerintah kepada masyarakat desa kolongan tetempangan meskipun hasil yang diinginkan belum sepenuhnya tercapai dikarenakan oleh hal-hal yang sudah dijabarkan diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

### **B. Menciptakan Kondisi Saling Percaya Antar Pemerintah Dan Masyarakat**

Sesui dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan-informan terkait bahwa pemerintah untuk menciptakan kondisi saling percaya antar pemerintah dan masyarakat, pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menjaga pos penjagaan di pintu keluar masuk desa, selain daripada program itu program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah juga menimbulkan rasa percaya dari masyarakat karena mereka merasa diberdayakan dan diperhatikan dengan adanya program-program tersebut oleh pemerintah.

Penciptaan rasa saling percaya antara pemerintah desa dan masyarakat desa sangat diperlukan agar supaya harmonisasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat bisa terjalin dengan bagus sehingga masyarakat akan merasa puas dengan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa. Berlandaskan hal tersebut pun rasa saling percaya antara pemerintah desa dan masyarakat tercipta dikarenakan pemerintah mempercayakan masyarakat untuk melakukan penjagaan di pos keluar masuk desa, serta memberikan program-program pemberdayaan kepada masyarakat.

### **C. Adanya *Employee Involvement* atau melibatkan stakeholders dalam pengambilan keputusan**

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan-informan terkait dengan keterlibatan adanya *employee involvement* yang melibatkan *stakeholders* dalam setiap pengambilan keputusan. Pemerintah Desa selalu mendiskusikan melalui rapat bersama dengan masyarakat setempat dimana masyarakat dapat memberikan ide-ide dan tanggapan kepada pemerintah, dalam hal pengambilan keputusan ini juga pemerintah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, Badan Permusyarawatan Desa (BPD). Dalam setiap pengambilan keputusan ini menggambarkan bahwa dalam setiap proses pengambilan keputusan untuk pengembangan dan kemajuan desa tidak diputuskan atau diambil secara sepihak oleh pemerintah desa melainkan selalu melibatkan masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan yang ada di desa untuk mengambil keputusan secara musyawarah. Setelah itu pemerintah juga menjalin kerjasama dengan *stakeholders* terkait untuk mengimplementasikan keputusan yang telah disepakati dan diambil bersama.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penulis mengambil kesimpulan akhir bahwa strategi pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah desa di tengah pandemi COVID-19 di Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat adalah sebagai berikut:

- a) Dilihat dari pemberian tanggungjawab dan wewenang pemerintah desa sudah berjalan dalam memberdayakan masyarakat desa di tengah pandemi dengan bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat serta program-program pemberdayaan yang dilakukan. Namun, belum maksimal dikarenakan kurangnya koordinasi dan pengawasan dari pemerintah.
- b) Dilihat dari menciptakan kondisi saling percaya antara pemerintah dan masyarakat sudah baik karena rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat sudah terbangun baik dengan adanya program-program pemberdayaan yang dilakukan.
- c) Dilihat dari adanya *employee involvement* yang melibatkan *stakeholders* dalam pengambilan keputusan sudah dilakukan dengan baik dikarenakan pemerintah melibatkan pelaku-pelaku usaha, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, BPD, serta masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan untuk desa.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan:

- a) Berkaitan dengan pemberian tanggungjawab dan wewenang dari pemerintah meskipun sudah ada upaya pelaksanaan program-program pemberdayaan, namun nyatanya masih belum mencapai hasil yang sepenuhnya maksimal disarankan agar pemerintah desa melakukan koordinasi dan pendampingan yang baik sehingga pemberdayaan yang diberikan bisa mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian, penulis juga

menyarankan agar pemerintah desa juga membuat kotak saran pengaduan di kantor desa agar bisa melihat setiap masukan saran maupun pengaduan mereka terhadap kinerja pemerintah desa.

- b) Berkaitan dengan menciptakan kondisi saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, harus lebih di tingkatkan lagi rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dengan cara setiap program-program ataupun perencanaan program oleh pemerintah harus melibatkan masyarakat agar supaya ada transparansi antara pemerintah dan masyarakat semakin meningkat dan terjalin lebih kuat.
- c) Berkaitan dengan adanya *employee involvement* yaitu melibatkan *stakeholders* dalam pengambilan keputusan, pemerintah harus tetap melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang ada di desa serta *stakeholders* lainnya yang terkait dalam musyawarah desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, M. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan RRA dan PRA*. Vissipress Media. Surabaya. Indonesia.
- Markus, M.J., Sondakh, T., Laloma, A. 2017. Pemberdayaan Pemerintah Desa Dalam Rangka Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe. *Jurnal Administrasi Publik*. 4 (48).
- Masikome, J.H.J., Lengkong, F. D. J., Londa V. Y. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Korban Bencana Banjir di Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*. 4 (48).
- Tulung, B.D., Laloma, A., Kolondam, H. F. 2020. Pemberdayaan Masyarakat Petani Gula Aren Di Desa Tambelang Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Peraturan Pemerintah Dea TDDT No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Wonok, G. R. J. 2020. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Politico*. 9(1).